



Model Pelibatan Masyarakat dan Organisasi Lainnya terhadap Lembaga Pendidikan

Neila Qonita¹, Muhammad Nazir², Septuri³, Erjati Abbas⁴, Afifuddin Ahmad Robbani^{5*}

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Koresponden Penulis: 2171010042@metrouniv.ac.id

Abstract. *In general, community participation is often interpreted as a contribution of energy, money or goods in order to make a development program or project a success. In general, the relationship between schools and the community has a goal to be achieved, namely improving the quality of education, so that the community can feel the direct impact of improving the quality of education in the form of school progress. Library research or literature review is the research method used in this research. Several data and information were obtained regarding community involvement in educational institutions sourced from several journal articles and books as primary and secondary data sources. The school's relationship with the community includes the school's relationship with other schools, the school with the local government, the school with other agencies and departments, and the school with the community in general. First, educational relationships are cooperative relationships in terms of education/students, between teachers at school and parents in the family. Second, cultural relations are collaborative efforts between the school and the community which enable mutual development and development of the culture of the community where the school is located. Third, institutional relationships, namely cooperative relationships between schools and other official institutions or agencies, both private and government.*

Keywords: *Society, Organizations, and, Educational Institution*

Abstrak. Secara umum partisipasi masyarakat diartikan sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam menyukseskan program pembangunan. Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan pada peningkatan mutu pendidikan, sehingga masyarakat merasakan dampak langsung dari peningkatan mutu pendidikan berupa kemajuan sekolah. Penelitian library research atau kajian pustaka menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa data dan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan yang bersumber dari beberapa artikel jurnal dan buku sebagai sumber data primer maupun sekunder. Hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. *Pertama*, hubungan edukatif ialah hubungan kerjasama dalam mendidik/murid, antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. *Kedua*, hubungan kultural adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. *Ketiga*, hubungan institusional, yakni hubungan kerjasama antar sekolah dengan instansi-instansi resmi, baik swasta maupun pemerintah.

Kata kunci: Masyarakat, Organisasi, dan Lembaga Pendidikan

A. LATAR BELAKANG

Sistem pendidikan yang ada di Indonesia menilai bahwa peran masyarakat pada pendidikan begitu vital. Selain menjadipada subjek suatu pendidikan, masyarakat juga berfungsi menjadi objek pendidikan. Mereka mempunyaikuasada dalam menciptakan pola pendidikan sesuai harapan sekaligus potensi masyarakat. Pendidikan sepatutnya memprioritaskan masyarakat sebagai aktor, karena jika tanpa mereka tujuan, kualitas, dan fungsi pendidikan menjadi terhambat sekaligus akan tidak tercapai sesuai harapan. Karena pendidikan terjadi di dalam masyarakat sekaligus dilakukan oleh masyarakat, dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, peran masyarakat pada pendidikan begitu vital, pasalnya Masyarakat sangat dapat memberikan pengaruh pada keberhasilan pendidikan, sekaligus hasil pendidikan tentunya dapat memberikan pengaruh pada masyarakat.

Peraturan pendidikan nasional yang dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat pada madrasah dan sekolah merupakan pokok atau pondasi dari keterlibatan masyarakat serta organisasi lainnya pada instansi pendidikan. Cita-cita dari rencana ini menjadi meningkatkan kualitas pendidikan, merekonstruksi manajemen institusi pendidikan, sekaligus menjadi titik peningkatan kesadaran mengenai urgensi dari partisipasi masyarakat pada instansi Pendidikan.

Dalam pembangunan masa depan gemilang untuk generasi penerus, Pendidikan tidak hanya tentang tugas sekolah. Dengan berbagai proyek kolaborasi yang baik, masyarakat sekaligus organisasi lain mengatur peran vital pada peningkatan sistem pendidikan. Keberadaan mereka merancang pola lingkungan pendidikan inklusif serta dinamis, dari program mentoring yang berguna untuk menginspirasi serta kerja sama bisnis sekolah yang mempelajari keterampilan praktis.

Keterlibatan organisasi-organisasi dan masyarakat pada lembaga pendidikan begitu urgenda dalam mendorong partisipasi aktif pada pendidikan, mendorong nilai kualitas pendidikan, sekaligus menciptakan kontribusi pada kualitas sosial. Kemajuan sosial tentu bisa diperoleh dengan adanya strategi humas yang terfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat pada lembaga pendidikan yang dapat mendorong semangat masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, salah satu tujuannya yakni menyiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah dan membawa bekal. Pada dasarnya keterlibatan masyarakat pada pendidikan, setiap individu masyarakat dibebankan peran sekaligus pada pengendalian serta penyelenggaraan kualitas layanan pendidikan.

Masyarakat pun memiliki tanggung jawab dalam mengerahkan support sistem sumber daya yang tentunya sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Masyarakat serta organisasi lainnya yang terlibat dengan instansi pendidikan sangat penting dalam melahirkan pendidikan yang terikat dan juga efektif. dalam rangka meningkatkan sarana serta prasarana pendidikan, masyarakat membantu dengan area pendidikan, gedung, serta teknologi pendidikan. Dalam rangka mengatasnamakan lembaga pendidikan, sekolah harus mempunyai reputasi baik dalam pandangan masyarakat dan juga mempersembahkan kebebasan untuk lembaga pendidikan dalam menahkodai organisasi mereka dengan prosedur yang sesuai kebutuhan masyarakat sekitar.

B. KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Partisipasi

Kata Partisipasi diambil dari bahasa inggris yaitu "*participate*" yang berarti ikut mengambil bagian (Echols, Jhon M. Dkk, 1996). Akan tetapi secara umum partisipasi masyarakat dapat juga diartikan sebagai sumbangan tenaga, uang, atau barang dalam rangka menyukseskan program atau proyek pembangunan. Dengan kata lain, partisipasi diartikan seberapa besar tenaga, dana, atau barang yang dapat disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi masyarakat kepada proyek- proyek pemerintah.

Rogers memberikan pengertian partisipasi sebagai tingkat keterlibatan anggota sistem sosial dalam proses pengambilan keputusan untuk suatu rencana (Rogers dkk, 1981).Sementara Davis mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan pikiran individu di dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk mengembangkan kemampuan sesuai dengan tujuan kelompok tersebut (Davis dkk, 1985). Kerangka berpikir Davis ini mengandung tiga pokok pikiran. *Pertama*, adalah keterlibatan mental dan pikiran. *Kedua*, adanya kemampuan bertindak atau bekerja. *Ketiga*, adanya tanggung jawab terhadap permasalahan kelompok dalam mencapai tujuan.

Menurut Poerbakawatja partisipasi adalah suatu gejala demokrasi tempat orang-orang diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan segala sesuatu yang berpusat pada berbagai kepentingan. Orang-orang juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban mereka.

Partisipasi dilakukan dalam bidang material serta bidang penentuan kebijaksanaan (Poerbakawatja, 1981).

2. Tingkatan Partisipasi

Mengacu kepada beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu program adalah berupa:

- a. Partisipasi dalam proses perencanaan atau pembuatan keputusan
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan program
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam pengevaluasian program.

Beberapa Poin tersebut senada dengan pendapat Subandiyah yang mengatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi:

- a. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam proses perencanaan
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program.

Selanjutnya, Westra mengatakan bahwa tingkatan partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi tiga. Antara lain:

- a. Tingkatan pengertian timbal balik
yaitu mengarahkan anggota agar mengerti terhadap fungsi masing-masing serta sikap yang harus diserasikan satu sama lain.
- b. Tingkatan pemberian nasihat
yaitu membantu individu untuk membuat suatu keputusan terhadap persoalan yang sedang dihadapi sehingga individu tersebut dapat saling tukar ide dengan individu lainnya.
- c. Tingkatan yang berkewenangan
yaitu menempatkan posisi anggota pada suatu keadaan sehingga anggota tersebut dapat mengambil keputusan terhadap persoalan yang tengah dihadapi.

Secara lebih luas partisipasi berarti ambil bagian atau ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, partisipasi orang tua siswa menunjukkan pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang tua siswa (baik secara individu maupun kelompok) untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam semangat demokrasi, partisipasi ini

bersifat sukarela. Sukarela berarti ikut serta dengan keikhlasan bukan karena paksaan atau intimidasi (Westra, 1977).

3. Fungsi, Tujuan, dan Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Sementara itu, dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 ditegaskan antara lain mengenai Fungsi, tujuan dan bentuk-bentuk peran serta masyarakat (termasuk orang tua siswa). Fungsinya adalah ikut memelihara, menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan pendidikan nasional. Sedangkan tujuannya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun bentuk-bentuk peran serta masyarakat dapat berupa (PP No. 39, 1992):

- a. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan.
- b. Pengadaan atau pemberian tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan atau pelatihan peserta didik.
- c. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar ataupun penelitian dan pengembangan.
- d. Pengadaandan penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional.
- e. Pengadaandana dan pemebrian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan pinjaman, beasiswa, dan bentuk-bentuk lain yang sejenis.
- f. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- g. Pengadaan dan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- h. Pemberiankesempatan untuk magang atau latihan kerja
- i. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraaan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional
- j. Pemberian pemikiran dan pertimbangan yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan
- k. Pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan

1. Keikutsertaan dalam program atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah baik di dalam ataupun di luar negeri.
4. Manfaat Partisipasi

Menurut Suryosubroto manfaat adanya partisipasi adalah antara lain:

- a. Memungkinkan diperolehnya sumbangan yang benar karena banyaknya sumbangan pikiran
- b. Mengembangkan kemampuan yang dimiliki anggota
- c. Membangun komunikasi yang baik didalam organisasi karena lebih banyak terjadi komunikasi dua arah
- d. Mendorong sikap orang untuk bertanggungjawab dan membangun kepentingan bersama (Suryosubroto, 1998).

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh pemahaman bahwa esensi dari partisipasi adalah keterlibatan, baik yang berkaitan dengan sikap maupun perbuatan nyata dalam kegiatan penyusunan rencana(pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, evaluasi, dan bahkan dalam memikul resiko dan tanggung jawab suatu program. Dari esensi partisipasi dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perbuatan yang berupa frekuensi dari partisipasi masyarakat tersebut.

Secara umum hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki tujuan yang hendak di capai yaitu peningkatan mutu pendidikan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari peningkatan mutu dari pendidikan berupa kemajuan dari sekolah. Adapun tujuan kongkrit dari manajemen hubungan antara sekolah dengan masyarakat antara lain adalah, Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik, Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini, dan Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah kearah yang lebih membunmi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan (Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2015).

Sedangkan menurut Zulkarnain Nasution fungsi humas pada lembaga pendidikan sebagai berikut:

- a. Mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung (melalui media/pers) kepada pimpinan lembaga publik intern (dosen/guru, karyawan dan mahasiswa/siswa).
- b. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti: menyampaikan informasi kepada pers dan promosi.
- c. Menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya. (Zulkarnain nasution, 2006).

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi humas di lembaga pendidikan adalah menumbuh dan mengembangkan hubungan yang harmonis melalui komunikasi dengan menggunakan media antara sekolah dengan publiknya, baik intern (dosen/guru, karyawan, mahasiswa/siswa) maupun ekstern (orang tua mahasiswa/orang tua siswa, masyarakat, instansi lain) dalam rangka mempublikasikan kegiatan humas di lembaga pendidikan sehingga menciptakan suatu opini, citra dan reputasi yang positif terhadap lembaga pendidikan tersebut serta fungsi humas pada lembaga pendidikan kedepan dituntut selalu profesional dalam mengelola informasi sehingga terwujudnya citra positif pada suatu lembaga.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* atau disebut juga dengan kajian pustaka. Penelitian library research dapat diartikan sebagai metode yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data informasi dengan cara mengumpulkan dari berbagai macam sumber yang dapat dipercaya sebagai rujukan. Penelitian library research atau kajian pustaka menjadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa data dan informasi mengenai keterlibatan masyarakat dalam lembaga pendidikan yang bersumber dari beberapa stikel jurnal dan buku sebagai sumber data primer maupun sekunder.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Masyarakat dengan Lembaga Pendidikan

Pada dasarnya hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu mengandung makna yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Sudah barang tentu bidangbidang yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu (1) hubungan edukatif, (2) hubungan kultural, dan (3) hubungan institusional (White dan Barber, 1997). Untuk penjelasan lebih lanjut dapat diperhatikan sebagai berikut:

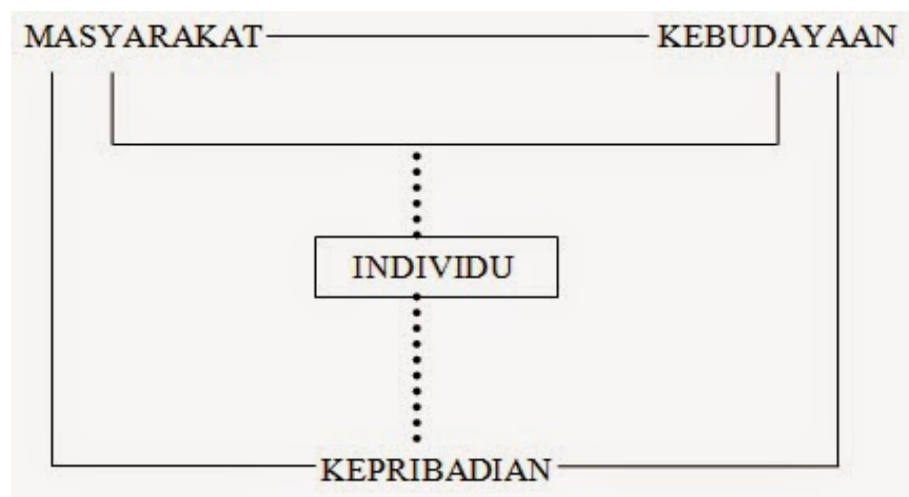
a. Hubungan edukatif

Merupakan hubungan kerjasama dalam hal mendidik/murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Adanya hubungan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan prinsip atau bahkan pertentangan yang dapat mengakibatkan keragu-raguan pendirian dan sikap pada diri anak/murid. Antara sekolah yang diwakili oleh guru dan orang tua murid tidak boleh saling berbeda atau berselisih paham, baik tentang norma-norma etika maupun norma-norma sosial yang akan ditanamkan kepada anak-anak didik mereka. Juga kerjasama dalam memenuhi fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk belajar di sekolah maupun di rumah, dalam memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kesulitan belajar maupun kenakalan anak-anak. Cara kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dengan para orang tua murid sebagai anggota komite sekolah. Disamping itu, dapat pula dilakukan dengan melakukan anjang sana oleh guru-guru ke rumah orang tua murid di luar waktu sekolah.

b. Hubungan Kultural

Pada hubungan ini usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Kita mengetahui bahwa

sekolah adalah merupakan suatu lembaga yang seharusnya dapat dijadikan barometer bagi maju- mundurnya kehidupan, cara berpikir, kepercayaan, kesenian, adat-istiadat, dari masyarakat lingkungan sekolah itu. Bahkan yang lebih diharapkan ialah hendaknya sekolah itu merupakan titik pusat dan sumber tempat terpencarnya norma- norma kehidupan (norma-norma agama, etika, sosial, estetika, dan sebagainya) yang baik bagi kemajuan masyarakat yang selalu berubah-ubah dan berkembang maju. Jadi, bukanlah sebaliknya sekolah hanya mengintroduksikan apa yang hidup dan ada di masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya hubungan kerjasama yang fungsional antara kehidupan di sekolah dan kehidupan di masyarakat. Kegiatan-kegiatan kurikulum sekolah disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan masyarakat. Berikut merupakan bagan contoh dari hubungan kultural masyarakat:

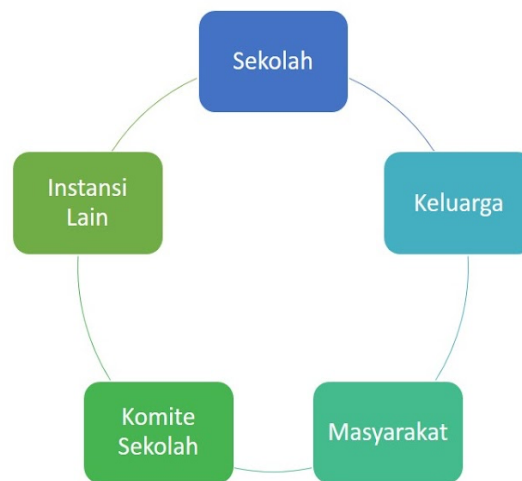


Gambar 1.0. Bagan Hubungan Kultural Masyarakat

Dari bagan gambar di atas menunjukkan bahwa pola masyarakat dan kebudayaan sangat berpengaruh terhadap pola kepribadian setiap individu manusia. Hal tersebut berimbas pada karakter atau kepribadian masyarakat yang sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan maupun adat istiadat setempat, sehingganya lembaga pendidikan yang berada di situ harus dapat menyesuaikan.

c. Hubungan Institusional

Merupakan hubungan kerjasama antar sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antar sekolah dengan sekolah-sekolah lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaan-perusahaan negara maupun swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan pendidikan pada umumnya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mendidik anak-anak yang nantinya akan hidup sebagai anggota masyarakat yang terdiri atas berbagai macam golongan, jabatan, status sosial, dan bermacam-macam pekerjaan, sangat memerlukan hubungan kerjasama itu. Berikut merupakan bagan dari hubungan Institusional:



Gambar 2.0. Bagan Hubungan Institusional

Dari bagan di atas dapat disimpulkan bahwa sekolah merupakan lembaga yang bersifat sosial, atau memiliki hubungan dengan sekolah atau lembaga lain, lembaga tersebut dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga masyarakat ataupun lembaga pemerintahan desa. Artinya satu lembaga tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peranan dari lembaga yang lain

2. Urgensi Hubungan Masyarakat dengan Lembaga Pendidikan

Dengan adanya hubungan-hubungan yang telah dipaparkan sebelumnya sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga-lembaga lain itu, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah tentang hal yang berkaitan dengan pengadaan

pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas serta alat-alat yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan program sekolah.

Demikian pula tentang pemilihan bahan pengajaran dan metode-metode mengajarnya. Oleh karena itu, tidak mustahil bahwa untuk menjelmakan hubungan kerjasama ini sekolah harus mengerahkan murid-muridnya untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Bersama-sama dengan masyarakat lingkungannya bergotong-royong memperbaiki jalan, mengerjakan perbaikan pengairan sawah; bersama menyelenggarakan perayaan-perayaan yang bersifat nasional maupun keagamaan dengan mementaskan berbagai atraksi kesenian, dan sebagainya. Sebaliknya, mungkin sekolah itu harus membantu menyediakan ruangan untuk keperluan rapat-rapat, perayaan-perayaan, kelompok-kelompok belajar masyarakat di lingkungan sekolah itu. Kegiatan-kegiatan semacam itu berarti melatih anak-anak berpartisipasi dan turut bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara lebih luas partisipasi berarti ambil bagian atau ikut serta dalam suatu usaha bersama dengan orang lain untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, partisipasi orang tua siswa menunjukkan pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang tua siswa (baik secara individu maupun kelompok) untuk mengambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan.

Secara umum hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki tujuan yang hendak di capai yaitu peningkatan mutu pendidikan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari peningkatan mutu dari pendidikan berupa kemajuan dari sekolah.

Fungsi humas pada lembaga pendidikan antara lain, humas harus mampu menjadi mediator komunikasi dalam sebuah lembaga pendidikan, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media/pers), menciptakan dan mendukung serta menunjang kegiatan yang dilakukan untuk proses mempublikasikan lembaga pendidikan, menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau publik intern, serta menciptakan image positif pada lembaga pendidikannya.

Hubungan sekolah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya. *Pertama*, hubungan edukatif ialah hubungan kerjasama dalam hal mendidik/murid, antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. *Kedua*, hubungan kultural adalah usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. *Ketiga*, hubungan institusional, yakni hubungan kerjasama antar sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Davis, Keith & Newstrom, Jhon (1985). *Prilaku Dalam Organisasi* (Edisi Ketujuh). Terj., Jakarta: Erlangga.
- Echols, Jhon M. & Shadily, Hasan (1996). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Fachruddin, Fuad (1992). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan*, Jakarta
- Davis, Keith & Newstrom, Jhon (1985). *Prilaku Dalam Organisasi* (Edisi Ketujuh). Terj., Jakarta: Erlangga.
- Echols, Jhon M. & Shadily, Hasan (1996). *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Fachruddin, Fuad (1992). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar.
- Gultom, R.M. S (1985). *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*, Salatiga: Universitas Satya Wacana.
- James A. Beane & Michael W. Apple, (1997). *The Case of Democratic School*, dalam Michael W. Apple and James A. Beane, „Democratic School“, Anker Publishing Company, USA.
- Kanwil Kemenag Kalsel, [//kalsel.kemenag.go.id/opini/271/Manajemen-KeterlibatanMasyarakat](http://kalsel.kemenag.go.id/opini/271/Manajemen-KeterlibatanMasyarakat).
- Kohen, Jhon M (1977). *Rural Development Partisipation*, USA: Cornel University.
- Nurhasanah, (2007). *Peran Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan*, Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar Volume 1, Nomor 1.
- Poerbakawatja, Soegarda (1981). *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.

- Rogers, Everett M (1981). *Komunikasi Inovasi*, Yogyakarta: Sumbangsih.
- Sayyid Agil Husin al-Munawwar. (2005). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat.
- Subandiyah. (1992). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah dasar Se-Jawa Tengah: Jurnal Kependidikan Nomor I, Tahun XXII*.
- Suharsimi arikunto & Lia Yuliana. (2012). *Manajemen Pendidikan*, Jakarta : Aditya Media.
- Supriono S. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Mojokerto: SIC.
- Suryosubroto. B. (1998). *Humas dalam Dunia Pendidikan*,. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Sutisna, Oteng (1987). *Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis dan Praktek Profesional*, Bandung : Angkasa.
- Tarcov, Narthan. (1996). *The Meaning of Democracy*, dalam Roger Soder, “Democracy, Education and School, Jossey Bass, San Fransisco,
- Westra, Pariata. (1977). *Beberapa hal hubungan Kerja Kemanusiaan*, Yogyakarta: BPA UGM.
- Zulkarnain Nasution. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*, Malang : UMM Perss.
- Direktorat Pendidikan Dasar.
- Gultom, R.M. S (1985). *Partisipasi Rakyat dalam Pembangunan*, Salatiga: Universitas Satya Wacana.
- James A. Beane & Michael W. Apple, (1997). *The Case of Democratic School*, dalam Michael W. Apple and James A. Beane, „Democratic School“, Anker Publishing Company, USA.
- Kanwil Kemenag Kalsel, //kalsel.kemenag.go.id/opini/271/Manajemen-KeterlibatanMasyarakat.
- Kohen, Jhon M (1977). *Rural Development Partisipation*, USA: Cornel University.
- Nurhasanah, (2007). *Peran Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan*, Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar Volume 1, Nomor 1.
- Poerbakawatja, Soegarda (1981). *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Rogers, Everett M (1981). *Komunikasi Inovasi*, Yogyakarta: Sumbangsih.
- Sayyid Agil Husin al-Munawwar. (2005). *Aktualisasi Nilai-Nilai Qurani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat.

- Subandiyah. (1992). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal di Sekolah dasar Se-Jawa Tengah: Jurnal Kependidikan Nomor I, Tahun XXII.
- Suharsimi arikunto & Lia Yuliana. (2012). Manajemen Pendidikan, Jakarta : Aditya Media.
- Supriono S. (2001). *Manajemen Berbasis Sekolah*, Mojokerto: SIC.
- Suryosubroto. B. (1998). *Humas dalam Dunia Pendidikan*,. Yogyakarta: Mitra Gama Widya.
- Sutisna, Oteng (1987). *Administrasi Pendidikan; Dasar Teoritis dan Praktek Profesional*, Bandung : Angkasa.
- Tarcov, Narthan. (1996). *The Meaning of Democracy*, dalam Roger Soder, "Democracy, Education and School, Jossey Bass, San Fransisco,
- Westra, Pariata. (1977). *Beberapa hal hubungan Kerja Kemanusiaan*, Yogyakarta: BPA UGM.
- Zulkarnain Nasution. (2006). *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*, Malang : UMM Perss.